

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Infrastruktur memiliki posisi yang amat penting bagi keberlangsungan kegiatan penduduk suatu wilayah. Kegiatan penduduk dapat ditampung dalam ruang-ruang sarana sosial dan ekonomi, tetapi tidak akan berjalan dengan baik tanpa didukung oleh pelayanan infrastruktur yang memadai. Sebagai contoh, kegiatan perekonomian penduduk suatu wilayah mungkin dapat ditampung pada ruang-ruang 2 yang berupa sarana perekonomian, seperti kawasan perdagangan, jasa, dan industri yang dimiliki oleh wilayah tersebut, tetapi tanpa dukungan penyediaan jaringan infrastruktur yang baik, sebagai contoh seperti jaringan jalan, air bersih, pembuangan sampah, drainase, dan sanitasi, kegiatan tersebut tidak dapat berjalan dengan optimal. Kegiatan perekonomian suatu wilayah yang didukung oleh pelayanan infrastruktur yang baik, dapat mendorong peningkatan intensitas dan kualitas kegiatan tersebut, yang berakibat pada peningkatan kesejahteraan penduduknya (Button, 2002 dalam Hadi Wahyono, 2006).

Sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama pemerintah untuk meningkatkan mobilitas masyarakat. Keseriusan pemerintah dalam membangun infrastruktur dapat dilihat dari APBN tahun 2015 yang mencapai Rp 290,3 triliun. Angka tersebut naik sekitar Rp 84 triliun dibandingkan APBN tahun 2014. Jika dilihat dari jumlah dana tersebut, bukan tidak mungkin akan banyak investor dari luar negeri untuk bekerja sama

dengan pemerintah dalam membangun infrastruktur di Indonesia. Dampak pembangunan infrastruktur telah banyak mendapatkan perhatian serius di “ World Economic Forum ” . Dikatakan bahwa dalam forum tersebut telah dilakukan evaluasi infrastruktur untuk menghasilkan ranking global secara keseluruhan, dan hasilnya menempatkan Hong Kong menjadi negara yang memiliki infrastruktur terbaik di dunia, diikuti oleh Singapura dan Belanda (*World Economic Forum, Oktober 2015*). Berdasarkan data tersebut, Indonesia jauh berada di peringkat 82 dunia. Masih banyak pembahasan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam membangun infrastruktur, mengingat peringkat Indonesia sendiri masih jauh bila dibandingkan dengan Hong Kong, bahkan negara tetangga sekalipun yaitu Singapura.

Infrastruktur memiliki peranan utama dalam perkembangan perekonomian suatu wilayah. Akan menjadi sia – sia bila perekonomian suatu wilayah bisa menunjang keberlangsungan hidup penduduk, namun tidak didukung dengan infrastruktur yang memadai, maka perekonomian menjadi tidak berkembang dan hanya sampai pada level yang sama. Perhatian utama pemerintah dalam membangun infrastruktur di Indonesia tentunya harus berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Listrik, air, dan transportasi adalah sesuatu yang masih menjadi permasalahan oleh masyarakat, mengingat infrastruktur tersebut belum bisa dirasakan oleh sebagian masyarakat yang hidup di daerah pedalaman Indonesia.

Sebagai provinsi berkembang dan menjadi jalur laut perdagangan Internasional, yang menghubungkan Samudra Hindia dengan laut Cina Selatan,

Provinsi Lampung bisa menjadi tolok ukur perkembangan infrastruktur di Indonesia. Begitu juga dengan Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki peran sebagai tuan rumah Asian Games 2018. Dengan infrastruktur yang masih terbatas jangkauan pelayanannya, laporan ini diharapkan dapat membantu pemerintah Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatera Selatan dalam memantau sejauh mana kemampuan dan potensi infrastrukturnya dalam menghadapi perkembangan ekonomi di daerahnya.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana mengetahui perbandingan kecukupan infrastruktur di Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan, guna mendukung aktifitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

1.3 Tujuan

1. Melihat sejauh mana kecukupan infrastruktur di Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatera Selatan menurut penilaian yang diberikan para insinyur teknik sipil dengan standar kriteria penilaian *World Economic Forum*.
2. Membandingkan hasil penilaian infrastruktur Provinsi Lampung dengan hasil dari penilaian infrastruktur Palembang.

1.4 Ruang Lingkup

Infrastruktur yang akan dimasukkan dalam laporan ini meliputi pelabuhan udara, pelabuhan laut, terminal, stasiun, jembatan dan jalan (nasional, provinsi dan kabupaten), ruang terbuka hijau, air minum, telekomunikasi, sekolah atau universitas, dan listrik di Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatera Selatan.

1.5 Manfaat

Manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Dapat digunakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai sarana evaluasi terhadap pengambilan kebijakan dalam perbaikan dan pengadaan infrastruktur di daerahnya.
2. Sebagai tolok ukur yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk menyusun APBD.